



FAKTOR UTAMA PEMBENTUK PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SRENGSEM, KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

THE MAIN FACTORS SHAPING SLUMS IN SRENGSEM VILLAGE, BANDAR LAMPUNG CITY USING THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD

Iqsal Aryo Syahputra^{a*}, Hafi Munirwan^b, Husna Tiara Putri^b

^aProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung; Bandung

^bPerencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera; Lampung Selatan

*Korespondensi: [iqsalaroyos123@gmail.com](mailto:iqsalaryos123@gmail.com)

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 5 Agustus 2022
- Artikel diterima: 26 Maret 2024
- Tersedia Online: 31 maret 2024

ABSTRAK

Terbentuknya kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Srengsem mencerminkan adanya permasalahan lingkungan, sosial, dan perekonomian yang perlu diatasi. Deliniasi kawasan kumuh di Kelurahan Srengsem terdapat di puncak bukit, dan kawasan sempadan rel kereta api serta peruntukan kelurahan tersebut sebagai kawasan industri menengah. Permukiman kumuh di kelurahan ini tergolong didalam klasifikasi kumuh dengan tingkat yang ringan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman yang diidentifikasi kumuh di Kelurahan Srengsem. Penelitian ini menggunakan mix method, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan dan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menilai faktor utama pembentuk permukiman kumuh. Berdasarkan hasil analisis, faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem meliputi terdapat beberapa rumah yang tidak memiliki status kepemilikan akan bangunan, kepadatan penduduk di beberapa kawasan deliniasi kumuh, minimnya pengelolaan terhadap sampah sehingga sampah rumah tangga yang dihasilkan dilakukan pembakaran, dan tingkat pendapatan penduduk yang rendah dengan terdapat beberapa warga dengan pekerjaan sebagai buruh dan juga pekerja serabutan.

Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process, Faktor Utama, Karakteristik, Permukiman Kumuh

ABSTRACT

The formation of slum settlements in Srengsem Village reflects environmental, social, and economic issues that need to be addressed. The delineation of slum areas in Srengsem Village is located at the top of the hill, along the railway line, and the designated area of the village as a medium-sized industrial zone. The slum settlements in this village are classified as mild in terms of their severity. The aim of this research is to examine the factors contributing to the formation of identified slum settlements in Srengsem Village. This research utilizes a mixed-method approach, collecting both primary and secondary data, and employing descriptive statistical analysis to identify area characteristics. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to assess the main factors shaping slum settlements. Based on the analysis results, factors influencing slum settlements in Srengsem Village include several houses lacking ownership status, population density in certain delineated slum areas, inadequate waste management leading to household waste incineration, and low-income levels among residents, with some engaged in labor and odd jobs.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Main Factors, Characteristics, Slum Settlements

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan akan jumlah penduduk yang ada di Indonesia berpotensi terjadi peningkatan setiap tahunnya (Seruni et al., 2020). Jumlah akan pertumbuhan penduduk tentunya akan memiliki dampak terhadap peningkatan kebutuhan primer yang paling utama yaitu kebutuhan tempat tinggal (Wimardana, 2016). Pada kondisi ini, peningkatan terjadinya alih fungsi pada suatu lahan di kawasan perkotaan sangatlah mungkin terjadi, khususnya bagi para masyarakat dengan perekonomian yang rendah yang ingin mendirikan bangunan berupa rumah yang di peruntukan sebagai tempat tinggal (Fitri, 2021). Hal ini tentunya akan menciptakan permukiman kumuh khususnya di wilayah perkotaan (Jabbar et al., 2022). Permukiman kumuh yang ada pada wilayah perkotaan di negara-negara berkembang berkaitan dengan kepemilikan lahan yang informal (Brueckner, 2013). Keberadaan permukiman kumuh yang apabila tidak dilakukan penanganan akan berdampak negatif bagi wilayah perkotaan seperti masalah sosial antar penduduk yang menghuni di kawasan tersebut, gangguan terhadap penataan kota, permasalahan terhadap kondisi lingkungan, peningkatan jumlah kemiskinan di wilayah kota, dan bahkan meningkatkan potensi terjadinya bencana (Muvidayanti, 2019).

Penanganan akan permasalahan ini menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan kondisi perumahan dan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat (Ramdani & Haryanto, 2013). Diperlukannya kebijakan dan tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapat menjaga kualitas lingkungan di wilayah perkotaan yang berkelanjutan (Arifin et al., 2020). Permukiman kumuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor geografis dan faktor psikologis (Zulkarnaini et al., 2019). Faktor lainnya yang menyebabkan kumuh adalah kondisi sarana dan juga kondisi prasarana, keterbatasan akan lahan perkotaan, tingginya angka urbanisasi, kondisi penataan ruang yang buruk, dan kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan akan kawasan permukiman kumuh (Krisandriyana et al., 2019).

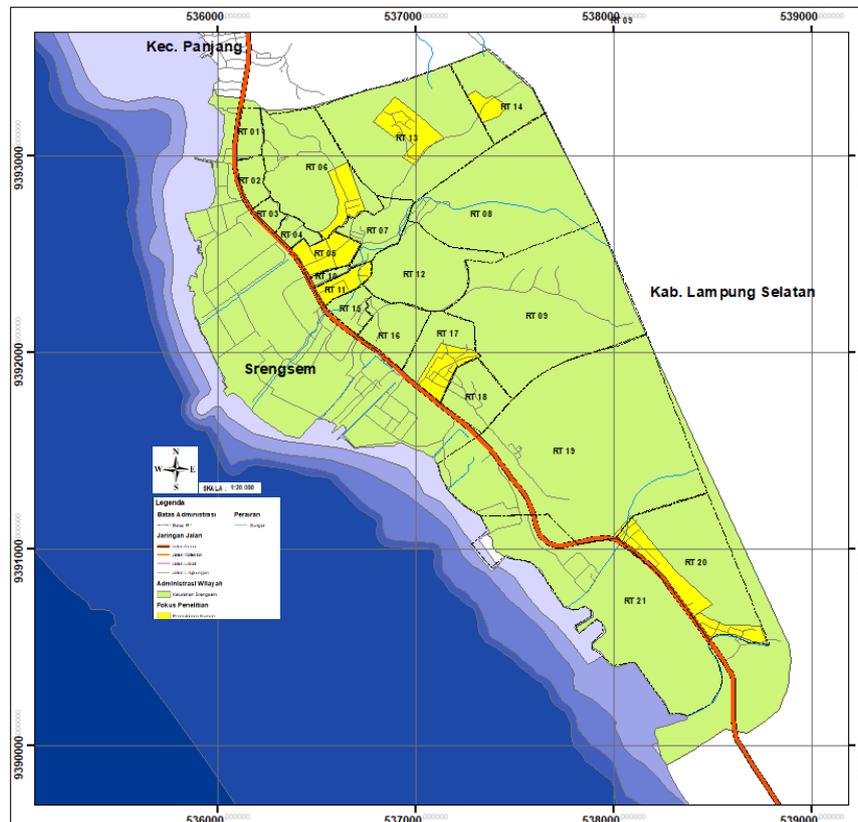
Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 165 Tahun 2021 menetapkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki 30 wilayah yang termasuk kedalam kawasan kumuh. Luasan kumuh secara keseluruhan mencapai 297,25 Ha, Kecamatan Panjang menjadi kelurahan dengan luasan kumuh terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 60,01 Ha. Menurut KOTAKU Bandar Lampung penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem telah selesai pada tahun 2018 tetapi kembali dinyatakan pada SK Walikota Bandar Lampung pada tahun 2021. Kelurahan Srengsem diperuntukkan sebagai kawasan Industri menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 hingga 2030. Menurut data Ro Simulasi Perhitungan RT Kumuh, Kelurahan Srengsem termasuk kedalam tingkat kumuh ringan dengan memiliki karakteristik yaitu terdapat wilayah kumuh yang berada pada puncak kawasan perbukitan dan ada yang berada di pinggiran jalur kereta api. Pada permukiman yang terindikasi kumuh di Kelurahan Srengsem terdapat rumah yang dapat dikatakan hunian ilegal karena berlokasi di tanah yang status kepemilikannya di miliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI), permasalahan lainnya adalah terhadap pelayanan air bersih perpipaan yang bersumber dari PDAM yang belum mencakup dan melayani kawasan permukiman di Kelurahan Srengsem (Nursyamsiyah et al., 2015). Kondisi yang ada di atas dapat dikatakan bahwa adanya permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian (Wimardana, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor utama yang menyebabkan terbentuknya kembali permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Srengsem. Penelitian ini akan melihat kondisi karakteristik wilayah untuk mencari faktor penyebab kekumuhan berdasarkan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, sosial masyarakat, dan perekonomian masyarakat yang nantinya akan menghasilkan faktor-faktor utama pembentuk kumuh di Kelurahan Srengsem. Penelitian ini menghasilkan kajian karakteristik kawasan dan faktor yang membentuk kawasan permukiman kumuh sehingga, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan permukiman yang terindikasi kumuh.

2. DATA DAN METODE

2.1. Wilayah Studi

Kelurahan Srengsem adalah salah satu kelurahan yang berada pada Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang terletak pada 530' 30" Lintang Selatan dan 105 20' 30" Bujur Timur. Kelurahan Srengsem memiliki luas wilayah administratif yaitu seluas 5,60 km² atau 560 hektar, yang dimana terbagi menjadi 2 lingkungan dan dengan 21 RT. Jumlah penduduk pada Kelurahan Srengsem sebanyak 6359 jiwa dan 2007 KK.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Srengsem

Kelurahan Srengsem menjadi fokus penelitian dengan didasarkan pada, kelurahan tersebut memiliki kumuh terluas di Kecamatan Panjang yaitu 19,8 Ha. Terdapat 7 deliniasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem dapat dilihat pada Gambar 1 yaitu RT 05, RT 06, RT 11, RT 13, RT 14, RT 17, dan RT 20. Berdasarkan hasil observasi RT 13 dan RT 14 berada di daerah puncak perbukitan yang harus diakses dengan jalanan yang cukup terjal tetapi sudah dilakukan pengkerasan. Sedangkan RT 05, RT 11, RT 17 dan RT 20 merupakan RT yang teridentifikasi terdapat permukiman kumuh dan dilintasi oleh jalur kereta api. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2011 hingga 2030 Kelurahan Srengsem menjadi kawasan industri menengah, dan kawasan industri tersebut berada pada pesisir pantai di Kelurahan Srengsem. Keberadaan peruntukan kawasan industri tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian di Kelurahan Srengsem dengan mengharapkan akan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentunya, menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan sosial dan lingkungan di wilayah tersebut yang mengakibatkan kekumuhan. Lokasi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem memiliki beberapa permasalahan seperti adanya permukiman yang berada di pinggir jalur kereta api masih terdapat bangunan yang ilegal dan permasalahan air bersih perpipaan. Kondisi tersebut dijadikan dasar pada

penelitian ini untuk menjadikan Kelurahan Srengsem sebagai kelurahan studi, untuk melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh.

2.2. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif, dengan memanfaatkan data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer seperti kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 responden, wawancara, dan observasi serta data sekunder. Metode analisis yang di gunakan adalah *mix method*, yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik permukiman yang terindikasi kumuh adalah analisis statistik deskriptif yang akan menghasilkan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem berdasarkan karakteristik kawasan. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem adalah dengan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang akan menghasilkan faktor utama pembentuk permukiman yang terindikasi kumuh. *Analytical Hierarchy Proses (AHP)* menjadi analisis yang digunakan di dalam melakukan analisis faktor utama dari pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem. Adapun tahapan AHP menurut (Saefudin & Wahyuningsih, 2014) adalah:

1. Penentuan tujuan penelitian dan menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan didalam penelitian
2. Melakukan penilaian terhadap kriteria tersebut yang di nilai oleh para pakar
3. Tahap Uji Konsistensi
 - a. Melakukan Uji Konsistensi dengan Eigen Vektor (EV)

$$EV = \frac{\sum \text{nilai elemen pada baris ke } n}{N}$$

Dimana:

EV = Eigen Vektor

N = Baris Matriks ke-n (n = 1,2,3,...n)

N = Banyak kriteria yang digunakan

- b. Menghitung λ maksimum

$$\lambda_{\text{maks}} = \sum (\text{Total matriks } \times \text{EV})$$

- c. Menghitung *Consistency Index (CI)*

$$CI = \frac{\lambda_{\text{maks}} - n}{n - 1}$$

- d. Menghitung *Consistency Ratio (CR)*

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana:

RI = *Random Index*

Matriks perbandingan dapat di terima jika $CR \leq 0,1$

4. Menghitung bobot
5. Melakukan analisa terhadap data yang ada.

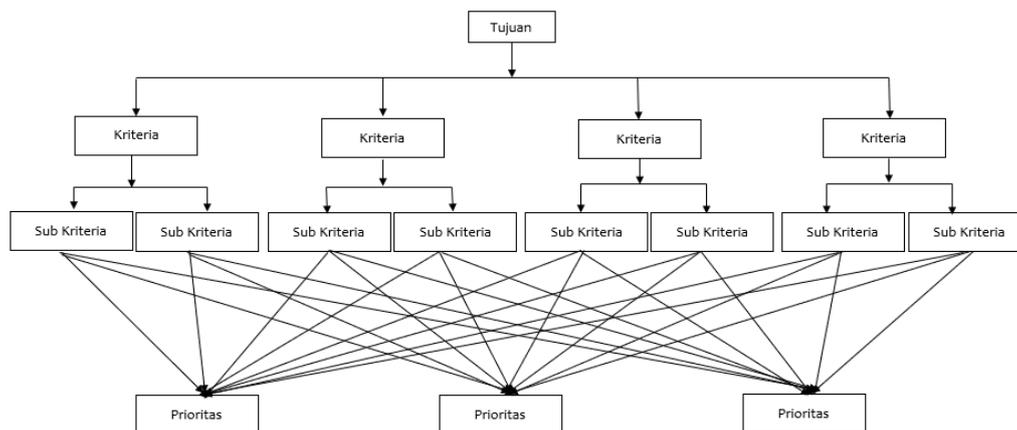
Analytical Hierarchy Process menggunakan cara multikriteria yang digunakan dengan melihat alternatif lain sehingga mengurangi kesubjektifan terhadap temuan dari penilaian kriteria. Sehingga dalam analisis untuk penentuan faktor utama pembentuk kumuh akan dihasilkan dari penilaian yang telah dilakukan dan menghasilkan pembobotan sesuai dengan tingkatan yang ada (Sastanti & Fibriani, 2019). Adapun langkah dalam menentukan faktor pembentuk permukiman kumuh dengan metode AHP adalah:

Tabel 1. Kriteria Penilai Pembentuk Permukiman Kumuh

No	Penilai	Kriteria
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Memiliki kepentingan sebagai badan yang melakukan perencanaan pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung	Memiliki kepentingan dalam melakukan pengembangan kawasan permukiman Kota Bandar Lampung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bandar Lampung	Memiliki kepentingan didalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman
4	Kecamatan Panjang	Memiliki sudut pandang secara langsung terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan
5	Kelurahan Srengsem	
6	Ketua RT	Sebagai masyarakat yang memahami kondisi tempat tinggal di wilayah penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Menurut Tabel 1 terdapat beberapa penilai yang melakukan penilaian terhadap faktor utama pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem. Keseluruhan penilai memiliki kriterianya masing-masing yang peneliti ambil berdasarkan tugas dan fungsi dari setiap instansi. Tidak hanya dari tugas dan fungsi dari setiap instansi, peneliti juga mengambil penilai dari ketua Rukun Tetangga (RT) yang lebih memahami kondisi wilayah, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari wilayah studi yaitu Kelurahan Srengsem. Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa penilai pada Tabel 1 yang dinilai dapat menghasilkan jawaban dari tujuan penelitian ini. Pohon AHP dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 2. Pohon AHP

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

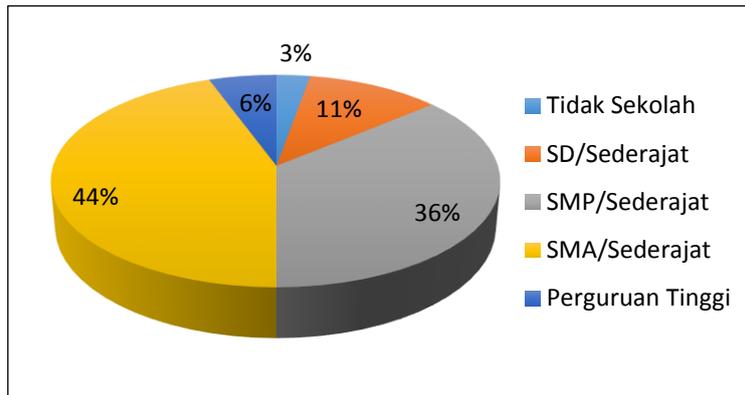
Peneliti melakukan observasi untuk melihat kondisi kawasan permukiman secara langsung yang berada di Kelurahan Srengsem. Terdapat beberapa temuan untuk melihat kondisi fisik bangunan, jalan, drainase, sumber air, persampahan, kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat. Pada Gambar 3 merupakan hasil dokumentasi yang didapatkan terkait kondisi sarana prasarana yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di wilayah permukiman.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. Kondisi Permukiman di Kelurahan Srengsem

Kawasan permukiman yang diindikasikan kumuh di Kelurahan Srengsem memiliki beberapa karakteristik terlihat pada Gambar 3 seperti terdapat kawasan permukiman yang padat sehingga hanya menghasilkan jalan dengan ukuran kurang lebih 1,5 m, berada di pinggir rel kereta api, dan berada di kawasan perbukitan yang memiliki akses sempit dan akses yang terjal. Permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem telah dilakukan penanganan dan selesai pada tahun 2018, tetapi Kelurahan Srengsem kembali masuk kedalam SK Walikota yang menyatakan masih terdapat kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil data Ro Simulasi RT Kumuh di Kelurahan Srengsem, kelurahan tersebut secara keseluruhan berada pada tingkat kekumuhan yang ringan. Peruntukan Kelurahan Srengsem sebagai kawasan industri menengah menyebabkan terdapat beberapa industri menengah yang terdapat di kelurahan tersebut terutama di wilayah pesisir. Hal ini tentunya dapat menjadi potensi dan daya tarik bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan lokasi hunian tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Secara keseluruhan kondisi bangunan telah menjadi bangunan permanen, tingkat kepadatan bangunan yang rendah, tetapi status kepemilikan lahan yang di beberapa rumah masih tidak memiliki status hak milik.



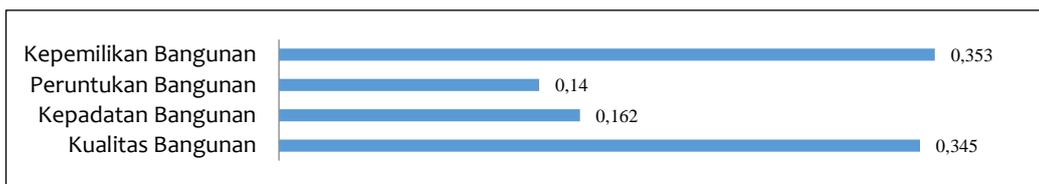
Sumber: Hasil Kuesioner, 2022

Gambar 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada kondisi sarana prasarana terlihat pada Gambar 4 masih terdapat jalan yang belum dilakukan pengkerasan serta masih terdapat jalan yang sempit, kondisi drainase masih ada yang tertutup sampah dan tanah, keterbatasan air bersih dikarenakan berada di perbukitan dan belum adanya akses air bersih perpipaan yang bersumber dari PDAM (Nursyamsiyah et al., 2015), minimnya pengelolaan sampah, dan minimnya proteksi kebakaran. Kondisi sosial masyarakat terlihat pada Gambar 4 pendidikan paling banyak berada di tingkat SMA/Sederajat sebesar 44%, dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Serta kondisi sosial ekonomi masyarakat jika dilihat berdasarkan pendapatan masyarakat masih banyak yang berada di bawah UMR Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 yaitu Rp. 2.770.794, dengan mayoritas jenis pekerjaan masyarakat adalah sebagai buruh pabrik yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Srengsem.

Analisis Kondisi Fisik Bangunan

Pada analisis kondisi fisik bangunan akan di tinjau berdasarkan kepemilikan bangunan, peruntukan bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan yang selanjutnya di olah menggunakan *Analytical Hierarchy Process* dengan membandingkannya terhadap kondisi karakteristik kawasan. Adapun berdasarkan hasil olahan nilai terhadap kondisi fisik bangunan adalah sebagai berikut:



Sumber: Analisis Expert Choice, 2022

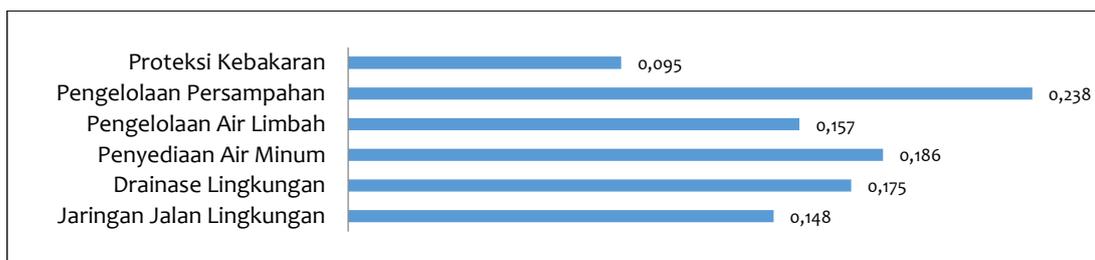
Gambar 5. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Fisik Bangunan

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, untuk melihat faktor pembentuk permukiman kumuh dari kondisi fisik bangunan pada Gambar 5 terlihat bahwa bobot tertinggi yaitu kepemilikan bangunan dengan nilai 35,5%. Jika dilihat berdasarkan hasil kuesioner, 76 responden menjawab bahwa status kepemilikan lahan mereka berstatus hak milik, 13 responden menjawab bahwa mereka menyewa di bangunan yang mereka tinggali, dan 11 responden lainnya menjawab bahwa tidak terdapat hak miliki pada lahan yang mereka jadikan sebagai lokasi tempat tinggal. Lahan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem beberapa berada di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa permukiman kumuh tersebut juga ilegal karena tidak memiliki izin (Nursyamsiyah et al., 2015). Keinginan masyarakat kerja di kawasan perkotaan dan menyebabkan masyarakat banyak tinggal di lahan ilegal, tentunya hal ini dapat menjadi pendorong munculnya kawasan permukiman kumuh (Rahayu et al., 2022). Sehingga berdasarkan pertimbangan

tersebut, jika dilihat berdasarkan kondisi fisik bangunan faktor kepemilikan bangunan dapat menjadi faktor utama yang membentuk kembali kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem.

Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana

Pada kondisi sarana prasarana peneliti akan meninjau dari beberapa kriteria diantaranya proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, drainase lingkungan, dan jaringan jalan lingkungan. Beberapa kriteria tersebut akan di olah dengan *Analytical Hierarchy Process* yang menghasilkan:



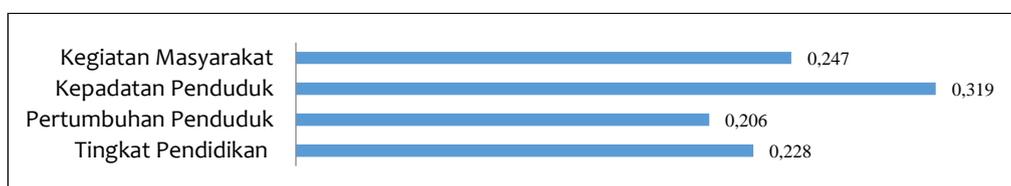
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022

Gambar 6. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Sarana Prasarana

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, dalam melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh pada Gambar 6 dapat terlihat bahwa kriteria dengan nilai tertinggi yaitu berada pada bagian pengelolaan persampahan dengan nilai 23,8%. Hasil limbah rumah tangga tidak dilakukan pengelolaan secara khusus oleh masyarakat melainkan terdapat masyarakat yang masih melakukan pembakaran, pembuangan sampah di sungai atau sembarangan, dan terdapat masyarakat yang memanfaatkan kendaraan pengangkut sampah. Tinggal di kawasan permukiman kumuh tentunya akan berada pada kawasan yang memiliki salah satu kekurangan yaitu kawasan permukiman yang dibawah standar pelayanan minimal salah satunya adalah terkait dengan persampahan (Rahayu et al., 2022). Pengelolaan sampah di daerah permukiman kumuh umumnya memiliki kondisi yang buruk akibat kegiatan pembuangan yang tidak memadai, sehingga memerlukan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan (Yang, 2024). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka, jika dilihat dari kondisi sarana dan prasarana faktor pengelolaan persampahan dapat menjadi faktor utama yang membentuk kembalinya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem.

Analisis Kondisi Sosial Masyarakat

Pada kondisi sosial masyarakat peneliti meninjau dari beberapa kriteria diantaranya adalah kegiatan masyarakat, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan. Selanjutnya kedua kriteria tersebut di olah dan menghasilkan:



Sumber: Analisis Expert Choice, 2022

Gambar 7. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Sosial Masyarakat

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, dalam melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh berdasarkan kondisi sosial masyarakat yang terlihat pada Gambar 7 nilai tertinggi ada pada kriteria kepadatan penduduk dengan nilai 31,9%. Jika dilihat berdasarkan data jumlah penduduk dan luasan wilayah di beberapa

RT yang tergolong dalam permukiman kumuh jika di bandingkan dengan SNI, kepatan penduduk masih tergolong rendah. Tetapi terdapat kawasan permukiman kumuh yang cukup padat, sehingga memiliki aksesibilitas yang terbatas. Kepadatan penduduk tentunya dapat menjadi suatu penyebab terbentuknya permukiman kumuh (Akbar & Alfian, 2018). Tingginya kepadatan penduduk disuatu kawasan tentunya akan mempengaruhi beberapa hak diantaranya kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini akan berdampak pada permasalahan baru dalam hal kependudukan seperti lapangan pekerjaan, laham yang digunakan sebagai tempat tinggal, kemiskinan dan kerusakan (Sari & Ridlo, 2021). Sehingga kepadatan penduduk di Kelurahan Srengsem dapat dikatakan sebagai faktor utama pembentuk kumuh dengan beberapa pertimbangan tersebut jika dilihat berdasarkan kondisi sosial masyarakat.

Analisis Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pada kondisi perekonomian masyarakat peneliti meninjau dari 2 kriteria yaitu jenis pekerjaan masyarakat, dan pendapatan masyarakat. Adapun hasil analisis yang di peroleh adalah sebagai berikut:



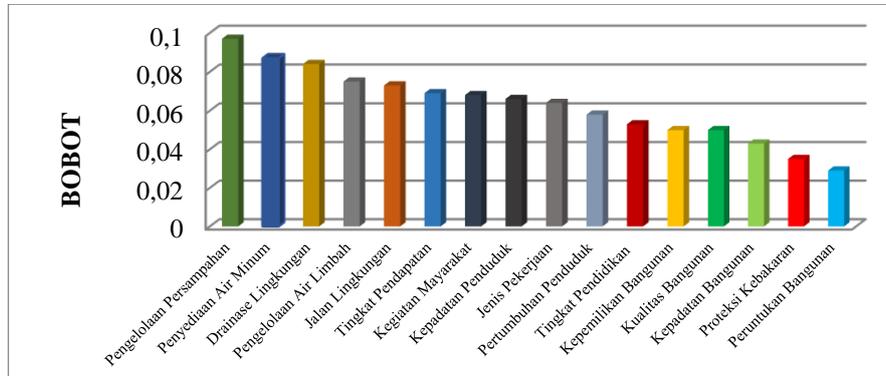
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022

Gambar 8. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Ekonomi Masyarakat

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, dalam melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat pada Gambar 8 yang memiliki nilai tertinggi adalah tingkat pendapatan dengan nilai 66,3%. Kondisi pendapatan masyarakat di permukiman yang terindikasi kumuh di Kelurahan Srengsem dengan mayoritas responden memiliki pendapatan dibawah UMR Kota Bandar Lampung dengan nilai Rp. 2.770.794 pada tahun 2022. Pekerjaan dari masyarakat di Kelurahan Srengsem mayoritas pekerjaannya adalah sebagai buruh, yang sebanding dengan keberadaan kawasan industri di wilayah sekitar Kelurahan Srengsem. Pendapatan yang rendah tentunya akan berdampak terhadap sulitnya masyarakat untuk mencari rumah yang layak untuk dihuni (Sari & Ridlo, 2021). Semakin rendahnya pendapatan mesyarakat makan akan meningkatkan potensi penyebab terbentuknya kawasan yang terindikasi kumuh, hal ini tentunya di sebabkan tidak dapat menciptakan hunian dengan lingkungan yang layak serta sehat untuk dihuni (Aguswin, 2021). Sehingga berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat pada faktor tingkat pendapatan masyarakat dapat dijadikan sebagai faktor utama pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem, karena tingkat pendapatan masyarakat akan mempengaruhi pola hidup masyarakatnya.

Sintesis Keseluruhan Faktor Pembentuk Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil dari *analytical hierarchy process*, terkait dengan faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh dengan menggunakan keseluruhan kriteria adalah sebagai berikut:



Sumber: Analisis Expert Choice, 2022

Gambar 9. Hasil Analisis Kombinasi Seluruh Faktor Pembentuk Kumuh

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut terdapat 3 faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Srengsem yaitu pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, dan drainase lingkungan. Pada Gambar 9 terlihat bahwa persampahan menjadi kriteria yang memiliki nilai terbesar, hal ini tentunya dapat diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang dan mengolah sampah rumah tangga yang akan berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan (Ramdani & Haryanto, 2013). Penyediaan air minum menjadi faktor dalam kriteria selanjutnya, hal ini tentunya terlihat dari kondisi permukiman yang berada di perbukitan serta masih belum terjangkaunya sumber air perpipaan yang bersumber dari PDAM untuk dapat mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga (Nursyamsiyah et al., 2015). Ketiga faktor utama pembentuk permukiman kumuh merupakan bagian dari sarana prasarana lingkungan permukiman. Kondisi pengelolaan persampahan yang masih minim dengan melakukan pembuangan sampah di sungai ataupun sembarangan serta masih membakar sampah hasil rumah tangga menjadi salah satu kebiasaan buruk masyarakat. Pada faktor penyediaan air minum, kondisi sumber air perpipaan masih sulit dijangkau oleh masyarakat karena belum masuknya PDAM kewilayah mereka, tetapi untuk air bersih bersumber dari bantuan beberapa pihak di beberapa titik yang selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah warga. Sedangkan pada kondisi drainase lingkungan dengan kondisi beberapa drainase buruk seperti lebar drainase yang masih sempit, keberadaan sampah yang mengendap didasar drainase membuat drainase semakin dangkal, dan terdapat drainase yang telah tertutup oleh tanah hal ini tentunya akan berdampak terhadap pengairan limpasan air dan berpotensi menciptakan genangan. Jika dilihat berdasarkan hasil keseluruhan, ketiga faktor utama pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem berdasarkan kondisi dari sarana prasarana yang ada. Sarana prasarana tentunya menjadi dasar dalam penyediaan pelayanan minimal pada kawasan permukiman yang ada di Kelurahan Srengsem untuk keberlangsungan kegiatan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan menggunakan 4 indikator pembentuk permukiman kumuh yang akan dikaitkan dengan hasil kondisi karakteristik lingkungan di Kelurahan Srengsem dihasilkan bahwa, Kondisi Fisik Bangunan, hasil analisis menyatakan bahwa faktor kepemilikan bangunan menjadi faktor dengan nilai tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, diakibatkan keberadaan permukiman di atas bukit dan terdapat permukiman yang terindikasi kumuh berada di pinggiran rel kereta api. Kondisi Sarana Prasarana, hasil analisis menyatakan bahwa faktor pengelolaan persampahan menjadi faktor dengan nilai tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, di

akibatkan dengan masih minimnya pengelolaan persampahan hasil limbah rumah tangga. Kondisi Sosial Masyarakat, hasil analisis menyatakan bahwa faktor kepadatan penduduk menjadi faktor dengan nilai tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, diakibatkan kepadatan penduduk menciptakan kawasan yang tidak layak huni dan dapat menimbulkan permasalahan sosial. Kondisi ekonomi masyarakat, hasil analisis menyatakan bahwa faktor tingkat pendapatan penduduk menjadi faktor dengan nilai tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, dikarenakan pendapatan masyarakat masih berada di bawah UMR Kota Bandar Lampung dan dengan mayoritas pekerjaan yaitu sebagai buruh.

Menurut hasil yang di dapatkan terdapat beberapa permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dilakukan penanganan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Srengsem. Hal inilah yang menyebabkan Kelurahan Srengsem yang telah dilakukan penanganan dalam kekumuhan di tahun 2018, kembali memiliki kawasan permukiman kumuh di tahun 2021. Pada tahun 2021 kekumuhan di Kelurahan Srengsem sudah masuk kedalam kategori ringan sehingga hanya beberapa permasalahan yang belum teratasi secara maksimal dan perlu penanganan kembali yang dilakukan oleh para *stakeholders* agar Kelurahan Srengsem tidak memiliki kawasan permukiman kumuh kembali.

5. REFERENCES

- Aguswin, A. (2021). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 48-57.
- Akbar, T., & Alfian, F. (2018). Kampung Tematik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kota Malang. *Wahana*, 70(2). <https://Malangkota.Go.Id/2016/09/05/Kampung>
- Arifin, M., Yudhoyono, A., Trisutomo, S., Wunas, A., Jinca, Y., Akil, A., Rasyid, A. R., Latief, I., Ali, M., Azmy, F., Dewi, Y. K., Osman, W. W., Ekawati, S. A., Wahyuni. S., Asfan, L. M., & Lakatupa, G. (2020). Penyuluhan Dan Pendampingan Penataan Lingkungan Pada Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 3(1), 99-108.
- Brueckner, J. K. (2013). Slums in Developing Countries: New Evidence for Indonesia. *Journal of Housing Economics*, 22(4), 278-290. <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2013.08.001>
- Fitri, D. A. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur) Dika Ardiana Fitri*.
- Jabbar, A., Hartanto, T., Tiaraingrum, F. H., Pratiwi, A. S., Rahmawati, L. Z. A., Zulfani, S. D., & Fariz, T. R. (2022, August). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati. In *Proceeding Seminar Nasional IPA* (pp. 212-221).
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitriarini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa Kota*, 1(1), 24-33.
- Nursyamsiyah, S., Jaya, M. T. B. S., & Bakri, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sains dan Pendidikan*, 2(1), 25-39.
- Rahayu, R., Syafri, Rasyidi, E. S., & Abbas, J. (2022). Strategi Penanganan Permukiman Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Di Kawasan Allu, Kecamatan Bangkala). *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 148-153.
- Ramdani, B. D., & Haryanto, R. (2013). Preferensi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kumuh Di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Teknik PWK*, 2(3), 569-577.
- Saefudin, & Wahyuningsih, S. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Rsd Serang. *Jurnal Sistem Informasi*, 1(1), 33-37.
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160-176.
- Sastanti, S. Y., & Fibriani, C. (2019). Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode Ahp Berbasis SIG Pada Kota Magelang. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 69-78. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.69-78>
- Seruni, D. S., Furqon, M. T., & Wihandika, R. C. (2020). Sistem Prediksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Malang Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Regression. *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer*, 4(4), 1075-1082.

- Wimardana, A. S. (2016). *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Yang, J. (2024). Waste Accumulation in Jakarta's Slums: Neoliberal Flows of Waste Distribution. *Geoforum*, 150, 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103994>
- Zulkarnaini, W. R., Elfindri, & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*, 16(2), 169–188.